

**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL
DI ERA OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS DI PROPINSI SULAWESI TENGAH)**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Pada Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**

**Disusun oleh :
NURJANNA LADJIN
NIM : C4B 006 087**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
September
2008**

Tesis

**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL
DI ERA OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS DI PROPINSI
SULAWESI TENGAH)**

Oleh
Nurjanna Ladjin
C4B006087

telah disetujui
oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dra. Herniwati RH, MS
Tanggal :

Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP
Tanggal :

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, September 2008

NURJANNA LADJIN

Motto Dan Persembahan

” Bacalah
 Dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,
 Dia telah menciptakan dari segumpal darah
 Bacalah,
 Dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah,
 Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada
 manusia apa yang tidak diketahuinya”.
 (Al-quran, Surat ke-96 : 1 – 5)

” Pelajarilah Ilmu “
 Barang siapa yang mempelajari karena Allah, itu taqwa menuntunnya,
 itu ibadah Membahasnya, itu jihad
 Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu sedekah
 Memberinya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Allah.
 (Abusy Syaikh Ibnu Hibban & Ibnu Abdil Barr, Ilya Al-Ghazali, 1986)

Karya kecil ini kupersembahkan buat:

Papa Daud Ladjin
 Mama Hartini Muhiddin

ABSTRAKSI

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah secara umum ternyata kondisi keuangan Propinsi Sulawesi Tengah kurang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa derajat desentralisasi fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah berada di bawah 20 %. Karena itu daerah dituntut untuk mengelola pembangunan daerahnya secara mandiri. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap kemandirian pemenuhan fiskal dan kebebasan dalam mengumpulkan penerimaan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel yang digunakan meliputi : investasi dan pendapatan perkapita. Data yang digunakan adalah data sekunder (*time series*) rentang waktu 2001 – 2006 yang diubah dalam bentuk data kuartalan. Data ini di analisis dengan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Squares = OLS*) dan metode deskriptif.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kemampuan keuangan daerah termasuk didalamnya teori keuangan daerah, teori otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, teori investasi, pendapatan perkapita.

Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah, tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi DAU terhadap TPD sebesar 61,36%. Di sisi lain, kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 24,18% dan 6,24 %, sisa anggaran tahun lalu sebesar 6,76% dan pinjaman daerah sebesar 0,77%. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Sulawesi Tengah di tinjau dari derajat kemandirian fiskal masih kurang.

Hasil studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah seharusnya melakukan kebijakan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor, memperhatikan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pusat dengan melakukan strategi pembangunan terhadap potensi ekonomi daerah.

Kata Kunci : Kemandirian fiskal, investasi, pendapatan perkapita.

ABSTRACT

The growth of local autonomy has driven Central Sulawesi Province into less adequate financial condition, which has its main source has not received from local income (PAD). Such phenomenon was shows by the study results that the rate of fiscal decentralization in the province was still under 20%. Therefore, there was a need for more autonomous local development management. It was expected that such autonomy would bring about fiscal fulfillment and independence in collecting local income.

This study aimed to analyse variables affecting fiscal autonomy in Central Sulawesi. The variables consisted of as follow : investment and income per capita. Data used for the research were time series secondary data for the period of 2001 – 2006, which in turn, were converted to quarterly data analysed by Ordinary Least Squares (OLS) and descriptive model.

Theories applied for the study were local financial strengths-related theories such as local finance, local autonomy and fiscal decentralisation theory, investment theory and gross regional domestic product theories.

From the analysis the study the variable of investment have any effect on the fiscal autonomy in Central Sulawesi Province. Meanwhile, and the variables income per kapita also did not have only effect on the fiscal autonomy.

Fiscal autonomy in the era of local autonomy, its fiscal dependence on the central government was still dominant. This might be observed by the proportion of General Allocation Fund (DAU) upon Total of Local Income (TPD), 61,36%. The other dimension reflected that the contribution of both local Income (PAD) and Tax and Non-tax share (BHPBP) to the Total of local Income (TPD) was still low, 24,18% and 6,24%, previous year surplus 6,76% and local loans 0,77%. According to the above analysis it came into a conclusion that the financial strengths of the Central Sulawesi Province were still inadequate from the perspective of fiscal autonomy.

This study result recommended the government of Central Sulawesi Province should make available any policy that result in conducive climate for investors, increase in economic growth and minimizing dependency on the central government by means of proper developmental strategies in favor of the local economic potentials.

Keywords : Fiscal autonomy, investment, income per capita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, yang telah senantiasa tercurah bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “ *Analisis Kemandirian fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)* “. Atas segalanya penulis bersyukur dan senantiasa memuji keagungan-Mu, Ya Rabbi.

Sebuah karya sulit dikatakan sebagai usaha satu orang, tanpa bantuan orang lain. Demikian pula dengan penulisan tesis ini, tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dorongan, bantuan dan kritik membangun dari berbagai pihak, olehnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Waridin, MS, Ph.D selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Dra.Herniwati RH, MS. Selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan semangat sehingga penulisan ini terselesaikan.
3. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku Pembimbing Pendamping, dengan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu serta selalu berkenan memberikan pencerahan dalam menghadapi berbagai kesulitan, sehingga mempercepat terselesaikannya penulisan tesis ini.

4. Bapak-Ibu Dosen pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) Universitas Diponegoro; yang telah memberikan pencerahan dan tambahan pengetahuan serta Bapak-Bapak Tim Penguji yang telah memberikan arahan demi sempurnanya karya ilmiah penulis.
5. Bapak Drs. H. Basri Sono, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk yang telah memberikan izin dan peluang serta motivasi bagi penulis untuk melanjutkan studi.
6. Papa Mama serta Kakak-Adik, Adik-adik iparku : Iringan doa serta bantuan moril maupun materil dari kalian semua, sehingga tugas dan beban dalam penyelesaian tesis dapat teratasi.
7. Keluarga Bapak Eko Joko Lelono, SE, M.Si dan Kak Nudiatul Huda Mangun, SE, M.Si. Keluargaku satu-satunya di Semarang. Tempat aku berkeluh kesah dan melepas kangen ketika ingat rumah.
8. DR. H. Laode Husen yang selalu memberikan nasehat, pencerahan ilmu dan memberi semangat.
9. drg. Rajendra , ” Membangunkan ketika aku jatuh ”.
10. Teman-teman Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk, yang selalu mensupport dari jauh.
11. Temanku Ujik, Terima kasih atas persahabatan kita, mudah-mudahan akan selalu abadi.
12. Teman-teman Angkatan XII Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) Undip : Mbak Titin, Bu Wid, Pak Dum, Pak Kris, Mbak Sri dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per

satu. Serta staf administrasi : mbak Indri, mbak Ingga, Mbak Tanti, Mas Muji dan Mas Condro.

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan tesis ini sebaik-baiknya, namun tentunya penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari sempurna. ” *Tiada Gading Yang Tak Retak* ”. Akhirnya, penulis berharap semoga kontribusi dalam tesis ini sekecil apapun dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya kalangan akademik yang tertarik dan ingin melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan studi ini. Namun, apabila terdapat kebenaran dalam penulis tesis ini semata-mata karena ridha, tuntunan dan petunjuk dari Allah SWT.

Semarang, September 2008

Penulis,

Nurjanna Ladjin

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
PERNYATAAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
ABSTRAKSI		v
ABSTRACT		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR TABEL		x
DAFTAR GAMBAR		xi
DAFTAR LAMPIRAN		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	14
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
	1.3.1 Tujuan Penelitian	15
	1.3.2 Manfaat Penelitian	15
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
	TEORITIS	17
	2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	17
	2.1.1 Otonomi Daerah	17
	2.1.2 Desentralisasi Fiskal	18
	2.1.3 Indikator Desentralisasi Daerah	29
	2.1.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	31
	2.1.5 Sistem Hubungan Keuangan Pusat – Daerah	33
	2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
	2.1.7 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	42
	2.1.8 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi	50
	2.1.9 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Perkapita	61

	2.1.10 Kemandirian Fiskal	63
	2.2 Penelitian Terdahulu	68
	2.3 Kerangka Pemikiran	80
	2.4 Hipotesis	83
BAB III	METODE PENELITIAN	84
	3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	84
	3.1.1 Variabel Penelitian	88
	3.1.2 Definisi Operasional	84
	a. Kemandirian Fiskal	84
	b. Investasi	84
	c. PDRB Perkapita	85
	3.2 Jenis dan Sumber Data	85
	3.3 Metode Pengumpulan data	87
	3.4 Teknik Analisis	88
	3.4.1 Analisis Ordinary Least Square (<i>OLS</i>)	88
	3.4.2 Alat Uji Analisis	89
	3.4.2.1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	89
	3.4.2.1 Uji Multikolinearitas	90
	3.4.2.2 Uji heteroskedastisitas	91
	3.4.2.3 Uji Autokorelasi	92
	3.4.2.2 Uji Statistik	94
	3.4.2.2.1 Uji t Statistik	94
	3.4.2.2.2 Uji F Statistik	95
	3.4.2.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)	96
	3.4.3 Metode Deskriptif	97
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	99
	4.1 Deskriptif Obyek penelitian	99
	4.1.1 Letak Geografis dan Administratif	100

	4.1.2 Perkembangan Ekonomi Menurut Penggunaan	105
	4.1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk	105
	4.1.4 Perkembangan PDRB Perkapita	107
	4.1.5 Perkembangan APBD Sulawesi Tengah	108
	4.1.6 Kontribusi PAD Terhadap APBD	109
	4.1.7 Kontribusi DAU dan DAK Terhadap APBD	110
	4.1.8 Struktur Perekonomian Sulawesi Tengah	112
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	114
	5.1 Hasil Estimasi Model OLS	114
	5.1.1 Pengujian Terhadap Asumsi Klasik	114
	5.1.1.1 Multikolinearitas	114
	5.1.1.2 Heteroskedastisitas	116
	5.1.1.3 Autokorelasi	117
	5.1.2 Pengujian <i>Goodness of Fit Model</i>	118
	5.2.1 Uji t	118
	5.2.2 Uji F	118
	5.2.3 Koefisien Determinasi	119
	5.2 Analisis Ekonomi	119
	5.2..1 Pengaruh Investasi Terhadap Kemandirian Fiskal	120
	5.2..2 Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Kemandirian Fiskal	124
	5.3 Analisis Deskriptif	126
BAB VI	PENUTUP	134
	6.1 Kesimpulan	134
	6.2 Saran-Saran	135
	6.3 Keterbatasan Penelitian	136

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, ditandai oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dapat di maknai dalam dua hal. *Pertama*, krisis tersebut mempunyai makna negatif, yakni menghancurkan ekonomi Indonesia dan mendorong terjadinya krisis multidimensional. Akibatnya, selama tahun-tahun awal terjadinya krisis, bangsa Indonesia berada dalam situasi yang serba sulit. Demonstrasi terjadi di mana-mana karena masyarakat tidak puas dengan situasi yang tengah berlangsung saat itu. Hal ini terjadi semakin buruk ketika kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam pemahaman nalar rakyat, tidak bisa diterima karena dianggap ” tidak berpihak” kepada mereka. Seperti dalam kasus pengurangan subsidi BBM. Sementara itu, modal sosial yang sudah lama tercabik-cabik karena prilaku pemerintahan orde baru telah mendorong terjadinya kekerasan berlangsung dalam skala yang luas. Kekerasan ini banyak dimotivasi oleh munculnya perasaan tidak adil yang berkembang di masyarakat akibat ” penjarahan” yang dilakukan para pejabat era orde baru. *Kedua*, namun diluar akibat yang buruk dan merusak tersebut, krisis mempunyai makna yang positif. Setidaknya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menjadi *entry point* bagi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berpolitik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang

cukup mendasar dalam orde reformasi tersebut adalah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan munculnya sistem politik demokratis.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari orde baru menuju orde reformasi, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 2001 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah

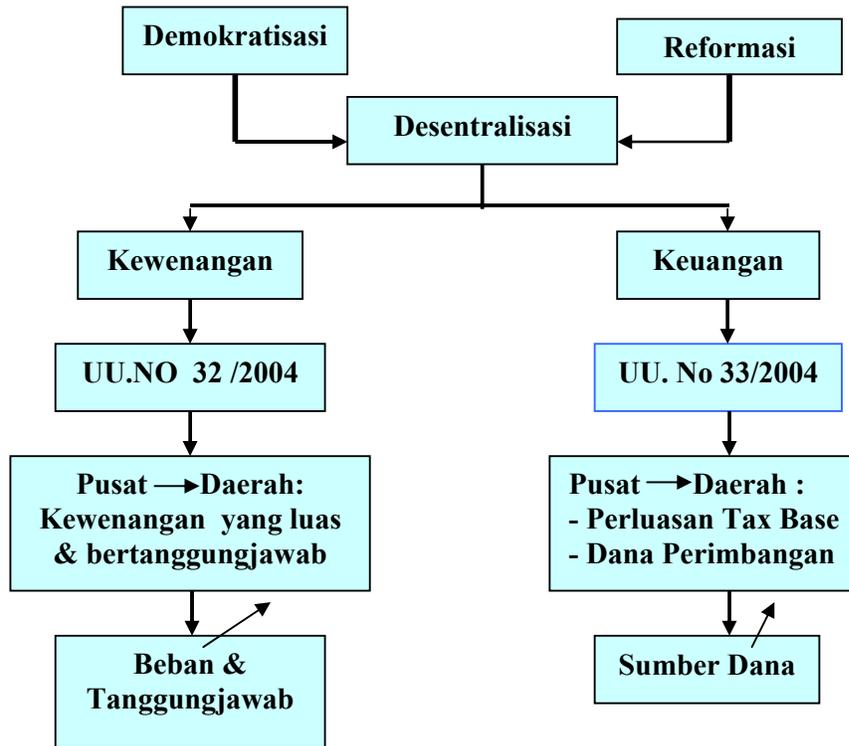
Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan reformasi adalah, *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Penerapan otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Undang -Undang ini dalam

perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau “ uang mengikuti kewenangan”. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi dkk, 2001).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, merupakan pijakan hukum atas implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 akan tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud (Khusaini, 2006). Secara ringkas kewenangan dan hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
di Era Desentralisasi



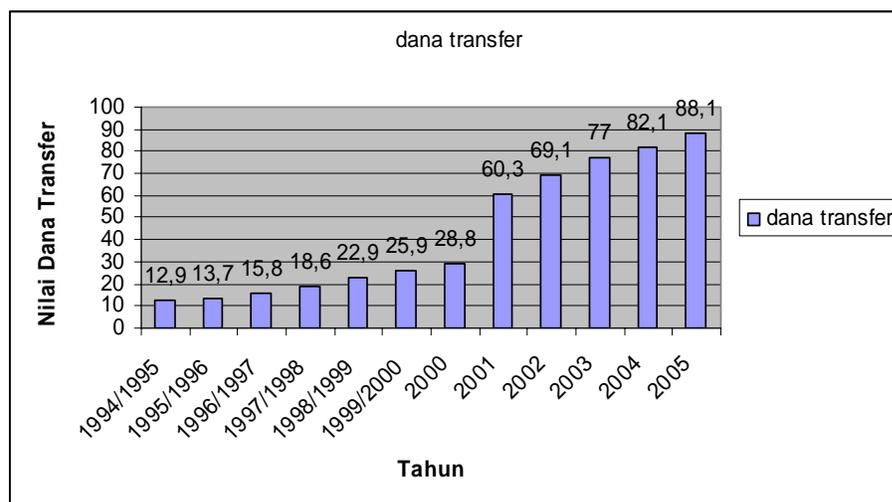
Sumber : Esther Sri Astuti dan Joko Tri Haryanto, 2006.

Inti dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan

aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat.

Melihat kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia pada era otonomi sangat berbeda dengan kondisi keuangan daerah sebelum berlakunya otonomi daerah. Bentuk dana perimbangan, khususnya dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan otonomi daerah telah mengalir dan meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang relatif besar. Dari 25,9 Triliun Rupiah sebelum adanya desentralisasi fiskal, menjadi sekitar 88,1 triliun Rupiah pada Tahun 2005. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik 1.2 berikut :

Grafik 1.2
Peningkatan Dana Transfer dari Pusat ke Daerah (1994 – 2005)



Sumber : Departemen Keuangan RI, 2005

Dari grafik di atas menunjukkan dana transfer yang di drop ke daerah dari tahun 1994/1995 sampai tahun 2005 terus meningkat. Pada tahun 1994/1995 dana subsidi 12,9 Triliun Rupiah meningkat terus hingga tahun 2005 sebesar 88,1 triliun Rupiah.

Kondisi fiskal tersebut di atas juga berlaku di Propinsi Sulawesi Tengah, peranan Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah menunjukkan nilai yang sangat besar, bahkan besaran nilai transfer pusat tersebut berlaku baik sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Proporsi Dana Perimbangan Terhadap APBD
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 - 2006
(Ribu Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan				Total Dana Perimbangan
	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	DAU	DAK	
2001	9.004.792	9.921.335	126.445.466	2.100.000	149.371.593
2002	13.778.452	1.069.742	190.510.000	-	205.358.194
2003	15.293.062	1.956.167	240.699.999	7.380.777	265.330.006
2004	22.220.624	1.769.744	258.145.000	-	282.135.368
2005	36.732.242	973.314	271.756.000	-	309.461.556
2006	41.372.066	2.870.288	477.668.000	-	521.910.355

Sumber : BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka dari Berbagai Tahun

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa porsi DAU dibanding dengan sumber penerimaan lain paling tinggi yakni rata-rata 90,28 persen. Di sisi lain kontribusi PAD dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah, menunjukkan begitu rendahnya kemampuan pemerintah daerah. Angka ketergantungan fiskal tersebut menunjukkan betapa kuatnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dibandingkan pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalan potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002)

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota, terus berbenah diri untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk menciptakan kemandirian daerah. Kondisi fiskal di Sulawesi Tengah, dari empat

komponen sumber penerimaan, hanya pajak daerah yang menyumbang secara signifikan terhadap total penerimaan PAD. Sementara sumber yang berasal dari retribusi daerah, BUMD dan lain PAD yang sah belum berperan optimal. Hal ini ditunjukkan dari tahun 2001 kontribusi pajak daerah sebesar Rp. 43.114.000 terus meningkat hingga tahun 2006 sebesar Rp. 135.032.259. Dari sektor pajak inilah nantinya diharapkan akan membentuk suatu struktur PAD yang kuat. Hal ini akan menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam mendukung kemandirian fiskal di Sulawesi Tengah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 – 2006
(Ribu Rupiah)

Tahun	Komposisi PAD				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Lain-Lain PAD Sah	
2001	43.114.000	7.349.595	1.352.485	2.433.240	54.249.320
2002	71.726.861	6.345.288	994.881	4.558.296	83.625.326
2003	84.255.189	6.369.017	1.022.210	8.925.827	100.572.242
2004	102.888.783	8.189.908	246.337	246.337	124.100.107
2005	120.026.304	9.572.370	915.498	1.835.183	141.349.355
2006	135.032.259	15.732.897	1.340.738	8.403.003	160.508.897

Sumber : BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Berbagai Edisi

Melihat kondisi sumber penerimaan di Sulawesi Tengah ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah. Untuk menghindari persoalan dalam era desentralisasi pada masa mendatang Pemerintah Daerah

Sulawesi Tengah perlu melakukan upaya-upaya yang serius dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD. Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Tengah ditunjukkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sekitar 25 % dari penerimaan daerah Sulawesi Tengah. Hal ini menjelaskan tingginya ketergantungan fiskal Sulawesi Tengah terhadap uluran tangan dari pusat. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Dalam proses menuju kemandirian, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembnagunan dirasakan masih sangat kurang. Hal ini tercermin dari peranan PAD terhadap APBD yang dirasakan masih rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini PAD secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil dan bahkan hanya sekitar 4% dari keseluruhan penerimaan negara (Insukindro, 1994). Sebagai contoh proporsi penerimaan daerah terhadap APBD di Propinsi Sulteng selama kurun waktu 2001-2006 dapat dilaihat dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Total Penerimaan Daerah Sulawesi Tengah (2001 – 2006)
(Ribuan Rupiah)

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	TPD (Ribuan Rupiah)	% PAD Terhadap TPD
2001	54.249.320	236.216.104	22,97
2002	83.625.326	294.517.759	28,39
2003	100.572.242	400.726.638	25,09
2004	124.100.107	413.605.244	30,00
2005	141.349.355	458.559.253	30,82
2006	160.508.897	729.623.326	21,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Dari Berbagai Edisi

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonom yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar (Koswara, 1999). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada beberapa faktor yang perlu diberdayakan diantaranya adalah investasi dan PDRB perkapita.

Investasi memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi,

menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja.

Salah satu komponen pengeluaran PDRB adalah investasi. Dalam konteks PDRB penggunaan, investasi dikenal sebagai pembentukan modal tetap (*Gross Fixed Capital Formation*) ditambah perubahan stok (*Increase in Stock*). Kontribusi pembentukan modal tetap bruto dalam kegiatan perekonomian Sulawesi Tengah dari tahun 2001 sampai 2006 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2001 proporsi sumbangan pembentukan modal tetap terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 10,94 persen terus meningkat sampai pada tahun 2006 yaitu sebesar 23,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peluang investasi di Propinsi Sulawesi Tengah cukup menjanjikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. 4 berikut :

Tabel 1.4
PDRB Penggunaan Propinsi Sulawesi Tengah
2001 – 2006 Atas Dasar Harga Berlaku 2000
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Perubahan Stok	Total	%
2001	1.677.520	116.879	1.796.400	10,9452887
2002	1.893.781	131.740	2.027.523	12,3534985
2003	2.264.467	200.623	2.467.093	15,0317553
2004	2.662.697	223.693	2.888.394	17,5987009
2005	3.157.697	247.473	3.407.175	20,7595826
2006	3.552.191	271.759	3.825.956	23,3111741
Total	15.208.353	1.192.167	16.412.541	100

Sumber : BPS, PDRB Sulawesi Tengah Dari Berbagai Edisi,
data diolah

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah dan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya.

Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, faktor pendapatan, jumlah kekayaan dan jumlah pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan dan konsumsi seseorang berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar dan berpengaruh dalam penerimaan daerah (Miyasto,1993). Perkembangan PDRB perkapita Propinsi Sulawesi Tengah lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Perkembangan PDRB Perkapita
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006
Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2000

Tahun	Nilai PDRB Perkapita Riil	Pertumbuhan (%)
2001	4.947.754	13,0328
2002	5.199.997	13,6972
2003	5.801.891	15,2826
2004	6.305.813	16,6100
2005	7.480.145	19,7033
2006	8.228.365	21,6741

Sumber : BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Dari Berbagai Edisi, data diolah

Pada Tabel 1.5 menunjukkan pendapatan perkapita di Propinsi Sulawesi Tengah secara agregat sampai tahun 2006 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 13,03 persen terus meningkat sampai tahun 2006 sebesar 21,67 persen. Pertumbuhan PDRB Propinsi Sulawesi Tengah yang meningkat dari tahun ke tahun tentunya merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan PAD nya dari tahun ke tahun. Semakin tinggi pendapatan per kapita, memberikan indikasi semakin tingginya tingkat pembangunan suatu daerah

Dari gambaran yang telah diuraikan di atas, maka sudah selayaknya pemerintah propinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya mencari dan mengembangkan potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan baik rutin maupun pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kemampuan fiskal daerah dan pengaruh faktor investasi dan PDRB perkapita terhadap derajat kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah periode 2001-2006.

I. 2 Rumusan Masalah

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu barometer dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalahnya proporsi penerimaan yang berasal dari PAD propinsi jumlahnya kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah (*fiscal gap*) antara kemampuan daerah (*fiscal capacity*) dan kebutuhan daerah (*fiscal need*).

Kondisi inilah yang menciptakan ketergantungan pemerintah propinsi pada pemerintah pusat, sehingga otonomi daerah yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Dengan latar belakang tersebut, maka perlu kajian mengenai beberapa faktor potensial guna mendukung kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

Penelitian ini akan mengangkat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh investasi dan PDRB perkapita terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah?
2. Bagaimana derajat kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah ?

I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. 3. 1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh investasi dan PDRB perkapita terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah.
2. Mengukur derajat kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah.

I. 3. 2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berbagai kajian-kajian yang berkaitan dengan kemandirian fiskal di era otonomi daerah, Indonesia umumnya dan di Propinsi Sulawesi Tengah khususnya, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kerangka berpikir serta model pengembangan dan aplikasinya

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/input bagi :

- a. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk menyusun sebagai program guna meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka kemandirian fiskal.
- b. Menambah referensi terhadap perkembangan ekonomi pembangunan di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah bukan otonomi ” daerah ” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.1.2. Desentralisasi Fiskal

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Bird dan Vaillancourt, 2000)

Secara luas desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan (Adisubrata, 2002). Jadi, secara riil desentralisasi merupakan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah yang bersangkutan (seperti sumber daya manusia, pendapatan daerah, Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)).

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital*

investment) di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan / atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat .

Dalam membahas mengenai desentralisasi fiskal, terdapat tiga variabel yang merupakan representasi desentralisasi fiskal (Khusaini,2006) yaitu :

1. Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN). Hasil studi yang dilakukan Zhang dan Zou (1998), menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa desentralisasi fiskal gagal mendorong pertumbuhan ekonomi di China. Hal ini merefleksikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan

investasi di sektor infrastruktur. Sementara, studi yang dilakukan oleh Philips dan Woller (1997) juga menunjukkan efek negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju.

2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

3. Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD), tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah. Variabel ini mengekspresikan besaran relatif antara pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Dillinger (dalam Sidik, 2001), pada dasarnya ada empat jenis desentralisasi, yaitu :

1. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.

2. Desentralisasi administratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi–fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) :
 - a. Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah pusat
 - b. Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*) yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).
 - c. Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana

pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.

3. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan , yang mencakup :
 - a. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah
 - b. *Cofinancing atau coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
 - c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) ,Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat serta pinjaman daerah (sumber daya alam).
4. Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi pasar.

Secara harafiah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *Tax Policy*. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 UU No. 27 tahun 1999 dan juga tercermin dari upaya untuk merubah UU No. 18 Tahun 1997 agar tidak bertentangan dengan semangat yang termaktub dalam UU Pemerintahan Daerah dan juga UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni adanya keleluasaan yang lebih besar bagi daerah untuk menggali potensi penerimaan melalui pajak ataupun retribusi. Di sisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan (dari bagi hasil berupa PBB, BPHTB SDA, dan dana alokasi umum/DAU). Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri. Jadi tidak lagi ditetapkan penggunaannya oleh pemerintah pusat seperti yang terjadi pada dana SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Inpres di masa lalu (Brahmantio dkk,2002)

Menurut Bahl (1999) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan memberikan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah diberikan :

1. Kewenangan untuk memanfaatkan, memobilisasi dan mengelola keuangan sendiri dan didukung dengan
2. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah . Kewenangan untuk mengoptimalkan sumber keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian Dana Perimbangan.

Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban

APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro. *Pertama*, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. *Kedua*, yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi “ ekspor pajak “ dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya, pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dari paling tidak beberapa jenis pajak.

Dalam perspektif teori, desentralisasi fiskal akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (*their constituents*), sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan menciptakan efisiensi dalam perekonomian, *public services* dan kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh *fiscal federalism theory* (Ross, 2002 dalam Khusaini, 2006). Berbagai kajian literatur tentang *fiscal federalism*, terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi (Ross, 2002 dalam Khusaini, 2006) yaitu :

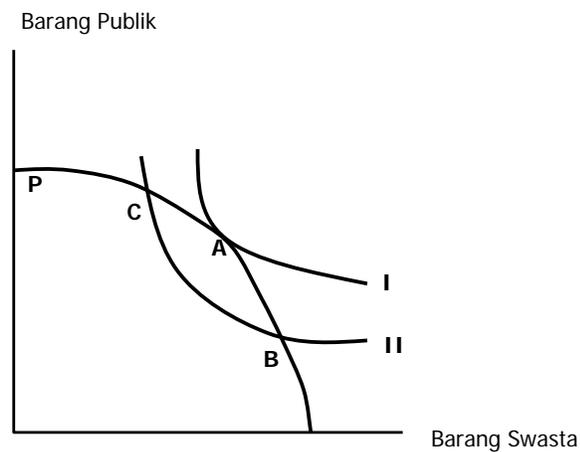
1. *Traditional Theories (First Generation Theory)*

Pandangan teori tradisional tentang *fiscal federalism* menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi, untuk mendapatkan kemudahan

informasi dari masyarakat. Dalam hal ini, terdapat dua ide yang mendasari keuntungan alokatif . *Pertama*, Penggunaan “ *knowledge in society* “, dimana menurut Hayek (1945), proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan mempermudah penggunaan informasi yang efisien. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi daerah sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat. *Kedua*, Tiebout (1956) mengenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah daerah dan mempunyai pandangan bahwa kompetisi antara pemerintah daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat. Suatu analogi argument lainnya yang dikenal dengan ungkapan “ *Love it or leave it* “. Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang angaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga

masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut (*leave*) atau tetap tinggal di wilayah tersebut (*love*) dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui perwakilannya di daerah (DPRD)[Hyman, 1993, dalam Khusaini, 2006). Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (*maximizing social welfare*) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Optimal Provision Barang Publik dan Barang Swasta



Keterangan :

- A : Efisiensi tingkat konsumsi dan produksi barang swasta dan barang publik
- B : Produksi barang swasta
- C : Produksi barang publik
- P : Kurva kemungkinan produksi
- I : Kurva indeferen I
- II : Kurva indefern II

Sumber : Khusaini, 2006

Dalam Gambar 2.1 tersebut bisa dijelaskan bagaimana penyediaan barang publik dalam sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Jika diasumsikan bahwa dalam ekonomi yang ideal tingkat konsumsi dan produksi suatu barang swasta dan barang publik adalah efisien. Dalam gambar ditunjukkan oleh titik A, yang merupakan titik persinggungan antara kurva indeferen I dengan kurva kemungkinan produksi P. Tetapi sekarang diasumsikan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan untuk memilih kebijakan pada titik C. Dalam hal ini banyak barang publik yang diproduksi. Hal ini tentu akan menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien lagi karena pada titik tersebut tingkat konsumsi dan produksi terletak pada kurva indeferen II. Pada titik C ini menunjukkan keadaan dimana pemerintah pusat sangat menentukan dalam perekonomian sehingga produksi barang publik tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk mencapai titik efisien kembali seperti pada titik A, diperlukan pengurangan produksi barang publik dan penambahan produksi barang swasta di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, konsep desentralisasi dapat memainkan peranan yang sangat penting sehingga alokasi sumber daya dan produksi barang publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya (Bahl dan Linn, 1992 dalam Khusaini, 2006). Dalam sistem pemerintahan sentralistik sebaliknya, tidaklah mudah untuk merubah alokasi antara barang swasta

dan barang publik . Hal tersebut dikarenakan proses pengambilan keputusan harus melewati sistem birokrasi yang panjang.

2. *New Perspective Theories (Second Generation Theories)*

Second generation theories, menjelaskan bagaimana desentralisasi akan mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Dengan implementasi desentralisasi fiskal apakah pemerintah daerah akan berperilaku berbeda dengan ketika dalam sistem pemerintahan yang sentralistik. Secara teoritik, seharusnya pemerintah daerah akan berperilaku berbeda ketika pemerintah pusat menyerahkan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu semakin berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut sangat bergantung pada fiskal insentif yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.3 Indikator Desentralisasi Fiskal

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah (desentralisasi fiskal). Desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian desentralisasi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Menurut Booth (2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai

proporsi total pendapatan propinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah pusat

Menurut Suparmoko (1987) untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat digunakan rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD dengan penerimaan daerah. Harus diakui bahwa derajat desentralisasi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Oleh karena itu otonomi daerah dapat terwujud apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif dan daerah mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber PAD.

Menurut Sugiyanto (2000) ukuran yang digunakan adalah perbandingan PAD terhadap pengeluaran pemerintah. Rumusnya : R/E ($R = \text{PAD}$ dan $E = \text{anggaran pengeluaran}$). Apabila rasio tersebut semakin besar, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar.

Menurut Sukanto (2000), untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal digunakan :

- Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah
- Perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah
- Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Menurut TIM LPEM - FEUI pada laporan akhir kebijakan desentralisasi dalam masa transisi (2000) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah , khususnya di bidang keuangan,

diukur dari sejauh mana kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan bagi hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Perbandingan PAD dengan Total Pengeluaran
- Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Rutin
- Perbandingan PAD+Bagi Hasil dengan Total Pengeluaran
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin
- Perbandingan PAD per kapita dengan Pengeluaran Rutin per kapita
- Perbandingan PAD per kapita dengan Total Pengeluaran per kapita
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita dengan Total pengeluaran per kapita
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita

Jika hasilnya tinggi, maka perana PAD dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah.

2.1.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman Pada UU No 32 Tahun Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa DAU dan DAK, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah.

Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Elia Radianto, 1997).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

2.1.5 Sistem Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Belakangan ini ada kecenderungan yang terjadi diseluruh dunia akan tuntutan terhadap peningkatan kewenangan daerah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Tuntutan ini didukung oleh alasan bahwa permasalahan yang terjadi di daerah sedemikian kompleks dan multidimensional sehingga tidak mungkin diatasi dengan suatu terapi yang bersifat terpusat. Selain itu disadari bahwa *span of control* pemerintah pusat sangat terbatas, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi tidak efektif dan efisien.

Menurut K. Davey (Ibnu Syamsi, 1994) hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan :

- a. Pendekatan Kapitalisasi

Berdasarkan pendekatan ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibidang keuangan adalah atas dasar kuasi komersial. Disini pemerintah pusat mengadakan investasi di daerah, berpatungan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola namun keuntungan yang diperoleh sebagian menjadi hak pusat dan sebagian menjadi hak daerah sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan perimbangan manajemennya.

b. Pendekatan Sumber Pendapatan

Pendekatan ini didasarkan pada sebagian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan oleh pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau kewenangan untuk menikmati sebagian (persentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama pusat.

c. Pendekatan Belanja

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah. Ada beberapa persyaratan dalam pendekatan ini, yaitu subsidi pemerintah pusat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi bantuan pada masing-masing daerah dan kebutuhan biaya-biaya pembanguan tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.

d. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-

sumber pendapatan dan target belanja. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (dan biasanya memang sangat kurang), maka kekurangannya itu akan di subsidi pusat.

Menurut Machfud Sidik (Aswarodi, 2001) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerahnya sendiri.

Sedangkan menurut Koswara (1999) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembanguann daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (Radianto, 1997).

Pengertian PAD menurut JB. Kristiadi (1985) adalah pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri.

Menurut Alfian Lains (1985) PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan lain-lain.

Untuk mengetahui potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Simanjuntak, 2001) :

1. Kondisi awal suatu daerah. Kondisi ini tergantung pada :

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan :

a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hali ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan

publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris (daerah yang berbasis pertanian) misalnya tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan tertentu akan lebih rendah daripada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Dalam masyarakat agraris, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara pada masyarakat industri, pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik tersebut.

- b. Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena perbedaan struktur ekonomi dan sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris.

Dari uraian diatas jelas bahwa pengetahuan akan kondisi awal suatu daerah sangat penting dalam menentukan potensi penerimaan daerah. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan :

- a. Komposisi industri yang ada di daerah
- b. Struktur sosial, politik dan institusional setra berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.
- c. Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari cabang-cabang perpajakan pemerintah.
- d. Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan.

Indikator sederhana untuk melihat kondisi awal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi sektor pertanian dan atau kontribusi sektor industri pada PDRB suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi sektor industri pada PDRB suatu daerah, maka akan semakin tinggi penerimaan daerahnya. Sebaliknya semakin tinggi kontribusi sektor pertanian pada PDRB suatu daerah, maka akan semakin rendah potensi penerimaan daerah.

2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan.

Dalam usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah :

- a. Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi. Peningkatan cakupan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan retribusi.
- b. Peningkatan besarnya penetapan. Dalam penelitian potensi pendapatan, perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat, sehingga besarnya penetapan pajak dan retribusi belum sesuai dengan potensi sebenarnya. Dalam rangka peningkatan cakupan perlu dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi.
- c. Mengurangi tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening, kemudian diambil langkah-langkah konkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru. Dalam

hal ini perlu adanya penyelenggaraan administrasi tunggakan yang lengkap dan rapi.

3. Perkembangan PDRB per kapita riil.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan logika yang sama pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4. Pertumbuhan penduduk.

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk . Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Tingkat inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak pembangunan I dan PBB.pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

6. Penyesuaian tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan daerah. Dalam rangka penyesuaian tarif, selain harus mempertimbangkan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan.

7. Pembangunan baru

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dll.

8. Sumber pendapatan baru.

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang ada.

9. Perubahan peraturan

Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan (Jaka Sriyana, 1999). Walaupun seberapa besar peranan PAD yang ideal juga masih sulit dijawab karena belum ada pedoman yang pasti untuk menentukan besarnya PAD yang ideal bagi suatu daerah (Munawar Ismail, 2001). Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kemandirian daerah terus berkembang.

Widayat (2000) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD pemerintah kabupaten/kota antara lain :

1. Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan
2. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan liar.
4. Adanya kebocoran-kebocoran
5. Biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave and Musgrave (1989); Anwar Shah (1994), besar kecilnya penerimaan di sektor pajak akan sangat ditentukan oleh : (1) pendapatan perkapita, (2) jumlah penduduk, baik pusat maupun daerah, Apabila pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang akan berakibat pada penerimaan pajak.. Jadi pendapatan perkapita berpengaruh (+)/positif terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula dengan jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk berarti memiliki pendapatan sedangkan pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak sehingga

dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

2.1.7 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak daerah (TAX)
2. Retribusi daerah (R)
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PROFT)
4. Lain-lain PAD yang sah (OTHS)

Secara matematika, Pendapatan Asli Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Bambang dkk, 2003) :

$$\text{PAD} = \text{TAX} + \text{R} + \text{PROFT} + \text{OTHS}$$

1. Pajak Daerah

Menurut UU No.34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak suatu daerah dipengaruhi secara positif oleh tingkat konsumsi (CONS) dan pajak tahun sebelumnya (TAX_1). Penerimaan pajak tahun sebelumnya mempengaruhi target pajak pada tahun berikutnya.

Secara matematika, Pendapatan asli Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Bambang dkk, 2003) :

$$\text{Pajak Daerah} ; \text{TAX} = f(\text{CONS}, \text{TAX}_1)$$

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, jenis retribusi dapat dibedakan :

- a. Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong *quasy goods* dan pelayanan yang memerlukan pengembangan dalam konsumsi dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan kepada masyarakat . Misalnya : retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil dan KTP.
- b. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan asset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan. Misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong.
- c. Retribusi perizinan tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah . misalnya : IMB, izin pengambilan hasil hutan ikutan.

Retribusi daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk (POP), pendapatan regional bruto (PDRB) dan retribusi sebelumnya (R_{-1}). Secara teoritis retribusi merupakan pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga jumlah penduduk dan pendapatan menjadi faktor penting dalam jumlah retribusi yang dapat dikumpulkan.

Secara matematika, retribusi daerah dapat ditulis sebagai berikut

((Bambang dkk, 2003) :

$$R = f(\text{PDRB}, \text{POP}, R_1)$$

b). Dana Perimbangan

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

Dana Bagi Hasil

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa dana hasil bagi bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas :

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan Umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi
- e. Pertambangan minyak gas bumi
- f. Pertambangan panas bumi (Republik Indonesia, 2004b)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU NO. 33 Tahun 2004 dibagi di antara daerah propinsi, kabupaten/kota dan pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90 % untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah propinsi.
- 2) 64,8 % (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota
- 3) 9 % (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Sementara itu, 10 % bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas

realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut (Republik Indonesia, 2004b) :

- 1) 65 % (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota
- 2) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80 % (delapan puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut (Republik Indonesia, 2004b) :

- 1) 16 % (enam belas persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah propinsi
- 2) 64 % (enam puluhempat persen) untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota.

Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai

dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap (*fiscal gap*), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Kemampuan/potensi fiskal/ekonomi daerah dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah, seperti potensi pendapatan domestik regional bruto (PDRB), industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), sumber daya lama (diukur dengan PDRB sektor primer) dan sumber daya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Daerah yang memiliki PDRB tinggi, aktivitas industri dan jasa yang besar, SDA yang melimpah dan SDM yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif kecil. (Republik Indonesia, 2004b).

Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan

yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. (Republik Indonesia, 2004-b)

Perimbangan keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dapat ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dengan tujuan untuk melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi atas penyediaan pelayanan publik, menciptakan peluang investasi dan bisnis, dan secara selektif para investor dan pebisnis memilih selera yang paling mendekati preferensi masyarakat setempat.

c). Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank;
- e. Masyarakat.

d). Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.

2.1.8 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Investasi

Dalam perekonomian daerah, investasi dapat menjadi motor penggerak pengembangan produksi sehingga output yang dihasilkan semakin baik. Dalam ekonomi ada terminologi ” *there is no (economic) growth without investment* “. Pernyataan ini mengandung makna bahwa investasi mempunyai peranan penting untuk pembangunan ekonomi, walaupun investasi bukan satu-satunya komponen pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, investasi mempunyai dua peranan penting dalam makro ekonomi. *Pertama*, pengaruhnya terhadap

permintaan agregat, dan ini akan mendorong output dan kesempatan kerja. Ini dampak atau peran jangka pendeknya. *Kedua*, efeknya terhadap pembentukan kapital. Adanya investasi akan menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya (Mudrajad dkk, 2005). Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus menerus, baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi mempunyai peranan penting di dalam permintaan agregat. *Pertama*, biasanya pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan terjadinya resesi dan boom. *Kedua*, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (*stock*) kapital.

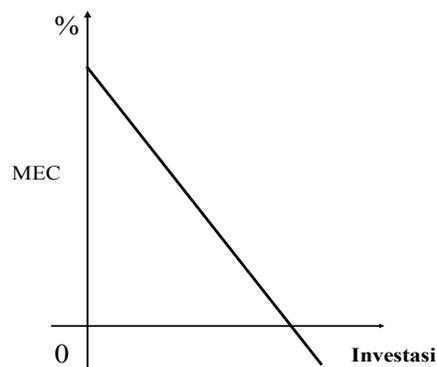
Teori tentang investasi pada umumnya hendak menjelaskan faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi investasi. Beberapa faktor yang diduga kuat pengaruhnya terhadap investasi antara lain : tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan perpajakan serta perkiraan (*expectation*).

1. Investasi tetap pada perusahaan (*cousiness fixed investment*)

MEC (*Marginal Efficiency of Capital*) menggambarkan tingkat pendapatan (*rate of return*) dari investasi baru yang diharapkan akan dilakukan. Keputusan seorang pengusaha untuk melakukan investasi tergantung pada besarnya MEC ini dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Apabila MEC lebih

besar dari tingkat bunga pasar, maka pengusaha akan melakukan investasi, dan sebaliknya.

Gambar 2.2
Tingkat Pendapatan dari Investasi



2. Jumlah Modal yang diinginkan (*desired capital stock*)

Keinginan seseorang pengusaha melakukan investasi dipengaruhi oleh pendapatan yang diharapkan dan biaya modal untuk membiayai investasi. Salah satu komponen biaya modal yang utama adalah tingkat bunga (Nopirin, 1996).

$$r_{riil} = r_{nom} - \pi$$

π = tingkat inflasi

Jumlah modal yang diinginkan tergantung pada jumlah produk yang ingin diproduksi dan biaya modal. Secara umum hubungan ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$K^* = f(B_m, Y)$$

dimana;

K^* = jumlah modal yang diinginkan
 BM = biaya modal
 Y = jumlah produk

3. Prinsip akselerasi (*Acceleration Principles*)

Prinsip akselerasi mengatakan bahwa tingkat/besarnya investasi proporsional terhadap perubahan dari output (GNP). Secara sederhana prinsip akselerasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengusaha menginginkan suatu hubungan tertentu (proporsi tertentu) dan modal yang diinginkan dengan hasil produksi (output).

$$K_1^* = a Y_1 \quad (1)$$

dimana :

K_1^* = jumlah modal yang diinginkan

a = perbandingan antara modal dengan output yang diinginkan

Pengusaha melakukan investasi apabila jumlah modal yang diinginkan pada suatu saat lebih besar daripada jumlah modal yang betul-betul dimiliki dengan penyusutan. Investasi dalam arti ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$I = K_1^* (1 - d) \quad (2)$$

d = penyusutan (depresi)

Jumlah modal pada akhir suatu periode $t = K_{t-1} (1 - d)$ ditambah dengan investasi netto

$$K_t = K_{t-1}(1-d) + I_t \quad (3)$$

Dengan asumsi bahwa penyesuaian terhadap jumlah modal yang diinginkan dilakukan dalam satu periode (koefisien penyesuaian = 1).

Implikasinya, jumlah modal periode t sama dengan jumlah modal yang diinginkan pada periode t, oleh karena itu diperoleh :

$$K_t = K_t^* \quad (4)$$

Dengan memasukkan persamaan di atas diperoleh prinsip akselerasi sebagai berikut :

$$I_t = K_t^* - K_{t-1}^* + d K_{t-1} \quad (5)$$

$$I_t = a (Y_t - Y_{t-1}) + d K_{t-1} \quad (6)$$

Persamaan (6) berarti bahwa investasi bruto tergantung pada pertumbuhan output dan penyusutan. Bagian pertama disebut investasi netto. Dengan demikian, investasi netto merupakan fungsi dan pertumbuhan output. Konsekuensinya suatu perekonomian yang tidak mengalami pertumbuhan output maka investasi juga akan sama dengan nol (Nopirin, 1996).

Model Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Model pertumbuhan Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat menentukan, khususnya watak ganda yang dimiliki investasi yaitu (Jhingan, 1993) :

- a. Menciptakan pendapatan yang disebut sebagai dampak permintaan.
- b. Memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal yang sering disebut sebagai dampak penawaran investasi. Selama investasi netto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

Model yang dikembangkan oleh Harrod-Domar yaitu (Jhingan, 1993) :

1. Model Domar

Domar mendasarkan modelnya pada pertanyaan bahwa investasi di satu pihak menghasilkan pendapatan dan di pihak lain menaikkan kapasitas produksi, maka investasi harus meningkat agar kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan kapasitas produksi, supaya keadaan *full employment* dapat dipertahankan. Ia menjawab pertanyaan ini melalui pendekatan dengan mempererat kaitan antara penawaran dengan permintaan agregat melalui investasi.

Domar menjelaskan kenaikan kapasitas produksi sisi penawaran dianggap sebagai laju pertumbuhan tahunan dari investasi. Kapasitas produksi yang baru diinvestasikan rata-rata sama dengan tabungan. Tetapi sebagian investasi baru akan menggantikan investasi lama. Karena itu, investasi baru akan bersaing dengan investasi lama di pasar tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain. Hasil output pabrik lama akan berkurang dan kenaikan output tahunan dari perekonomian sedikit lebih kecil daripada kapasitas produksi yang baru diinvestasikan.

Kenaikan yang diperlukan dalam permintaan agregat di sisi permintaan dalam model Domar menjelaskan bahwa multiplier Keynesian akan terjadi. Misalnya kenaikan rata-rata pendapatan (Y), sedangkan kenaikan investasi sama dengan multiplikator ($1/\alpha$) kali kenaikan investasi. ($\Delta Y = I \frac{1}{\alpha}$).

Untuk mempertahankan *equilibrium* pendapatan pada *full employment*, permintaan agregat harus sama dengan penawaran agregat. Dengan demikian persamaan akan berubah menjadi $\Delta I \frac{1}{\alpha} = I\sigma$. Persamaan ini menunjukkan bahwa

untuk mempertahankan *full employment*, laju pertumbuhan investasi *autonomus netto* ($\frac{\Delta I}{I}$) harus sama dengan *marginal propensity to saving* kali produktivitas modal ($\alpha \times \sigma$). Ini batas laju kecepatan investasi yang diperlukan untuk menjamin penggunaan kapasitas potensial dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang mantap pada keadaan *full employment*.

2. Model Harrod

Model Harrod didasarkan pada tiga laju pertumbuhan yaitu :

- a. Laju pertumbuhan aktual (G) ditentukan oleh ratio tabungan dalam ratio output. Laju pertumbuhan akan menunjukkan variasi klasik jangka pendek dalam laju pertumbuhan ekonomi.
- b. Laju pertumbuhan terjamin (GW) merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian.
- c. Laju pertumbuhan alamiah (Gr) oleh Harrod dianggap sebagai ” optimum kesejahteraan ” dapat juga disebut sebagai laju pertumbuhan potensial.

Laju pertumbuhan aktual dalam model adalah $G = S$. Dimana G adalah laju pertumbuhan output periode waktu tertentu dan dapat dinyatakan sebagai $\frac{\Delta Y}{Y}$; adalah tambahan netto terhadap modal, yang didefinisikan sebagai ratio

investasi terhadap kenaikan pendapatan, yaitu $\frac{I}{\Delta Y}$ dan S adalah kecenderungan

menabung rata-rata yaitu $\frac{S}{Y}$. Dengan memasukkan ratio ini ke dalam persamaan

di atas kita peroleh persamaan sebagai berikut $\frac{\Delta Y}{Y} \times \frac{I}{\Delta Y} = \frac{S}{Y}$ atau $\frac{I}{Y} = \frac{S}{Y}$ atau $I=S$.

Laju pertumbuhan terjamin menurut Harrod adalah laju pertumbuhan dimana para produsen merasa puas atas apa yang dikerjakan. Ini merupakan equilibrium usaha yang merupakan garis kemajuan yang apabila tercapai akan memuaskan para penerima laba, bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Jadi, laju pertumbuhan ini berkaitan dengan tingkah laku pengusaha. Pada laju pertumbuhan terjamin ini permintaan dianggap cukup tinggi oleh para pengusaha untuk menjual apa yang diproduksi, dan mereka akan terus memproduksi dengan persentase laju pertumbuhan yang sama, dan ini merupakan lintasan di mana penawaran dan permintaan barang dan jasa akan tetap berada dalam equilibrium berdasarkan kecenderungan tertentu. Dimana persamaan laju pertumbuhan terjamin berubah menjadi $Gw + Cr = S$.

Dimana Gw merupakan laju pertumbuhan terjamin atau laju pertumbuhan pendapatan dalam kapasitas penuh yang akan sepenuhnya memanfaatkan stok modal yang sedang membengkak, sehingga memuaskan para pengusaha atau jumlah investasi yang mereka tanam. Jadi, Gw dalam hal ini adalah nilai $\frac{\Delta Y}{Y} \times Cr$

(modal yang mereka butuhkan).

Laju pertumbuhan alamiah adalah laju kemajuan dimana pertumbuhan penduduk dan perbaikan teknologi berjalan lambat. Laju ini tergantung dari variabel-variabel makro, seperti : penduduk, teknologi, sumber alam dan peralatan

modal. Dengan kata lain, ini merupakan laju pertumbuhan output data, pekerjaan penuh yang ditentukan oleh laju pertumbuhan dan laju perkembangan teknologi. Dimana untuk pertambahan alamiah ini adalah $G_n + Cr \neq S$. Dimana G_n adalah laju pertumbuhan pekerjaan penuh alamiah.

Menurut Boediono (1990), investasi adalah pengeluaran oleh produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk tujuan investasi, yaitu untuk penambahan stok di gudang atau perluasan pabrik-pabrik. Sedangkan menurut Soeparmoko (1991), investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Persediaan kapital terdiri dari : pabrik, mesin-mesin kantor dan barang tahan lama yang hanya dipakai dalam proses produksi, termasuk rumah dan persediaan barang-barang yang belum terjual pada tahun yang bersangkutan.

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan dalam negeri meningkat dan seterusnya. Maka terciptalah pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001).

Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan

kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997)

Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Suryaningrum (2000), Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu : (1) pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, (2) pertumbuhan yang disebabkan oleh tenaga kerja, dan (3) pertumbuhan yang disebabkan oleh perubahan dalam produktivitas (Suryaningrum, 2000). Dengan demikian investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor penentu dalam posisi perekonomian, maka secara tidak langsung investasi berpengaruh terhadap penerimaan daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi, maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi, investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi (Yuliadi, 2007).

Realisasi investasi dapat ditunjukkan dengan pendekatan PDRB berdasarkan penggunaannya yang meliputi penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang jadi baru dan jasa tanpa melihat *durability* dari barang dan jasa itu dikurangi penjualan dari barang bekas netto (penjualan – pembelian barang bekas netto), dengan mengecualikan pengeluaran yang bersifat transfer, pembelian tanah dan rumah. Pengecualian ini dilakukan sebab transfer akan dihitung sebagai pengeluaran pada konsumen yang menerima transfer tadi sedangkan pengeluaran untuk tanah dan rumah dimasukkan dalam item pembentukan modal (*capital formation*).

- b. Konsumsi pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah ini mencakup pengeluaran rutin untuk pembelian barang dan jasa dari pihak lain yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dikurangi hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran rutin disini meliputi pembayaran upah dan gaji kepada pegawai-pegawai pemerintah, belanja barang, biaya-biaya pemeliharaan dan biaya-biaya rutin lain. Termasuk juga pengeluaran belanja modal untuk keperluan militer.

- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto

Pembentukan modal tetap mencakup besarnya modal yang ditanam selama 1 tahun, baik oleh pemerintah, swasta, lembaga swasta yang tidak mencari untung maupun rumah tangga (terbatas pada tanah dan rumah) dikurangi dengan jumlah penjualan barang-barang modal bekas selama 1 tahun. Yang mencakup dalam barang modal tetap (*durable procedure goods*) dan umurnya lebih dari satu tahun, misalnya tanah, rumah, gedung, jalan, jembatan, dam, mesin, alat transport, dan sebagainya.

d. Perubahan stok

Perubahan stok adalah barang-barang yang diproduksi maupun yang diimpor pada tahun itu, tapi belum sempat dipakai sampai akhir tahun, hingga masih disimpan sebagai stok. Stok yang disimpan ini meliputi barang-barang mentah yang belum sempat diproses menjadi barang lain, barang yang masih dalam proses (*work in process*) dan barang-barang jadi yang belum sempat dijual.

e. Ekspor netto

Ekspor netto berarti selisih antara ekspor dan impor dari barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa meliputi barang-barang yang dijual ke luar negeri, dimana termasuk didalamnya barang-barang dagangan (*merchandise*), jasa transport, asuransi dan jasa-jasa lain. Begitu pula dengan impor termasuk barang-barang dagangan, jasa-jasa lain yang dibeli dari luar negeri. Yang termasuk dalam ekspor dan impor disini ialah pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat pemberian/hadiah ke atau dari negara-negara lain dan barang-

barang yang di ekspor/impor dengan dibiayai oleh uang yang diperoleh dari transfer antar negara.

2.1.9 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan PDRB Perkapita

Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1999).

Nilai pendapatan perkapita diperoleh dari membagi pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sadono Sukirno, 1999) :

- a. Perkapita PNB = $\frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
- b. Perkapita PDB = $\frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan

oleh berbagai unit ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB perkapita adalah PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2000).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang meningkat.

2.1.10 Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembanguan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997)

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (World Bank 1994 dalam Suhab 1997).

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada

bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain :

- 1) $\frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$
- 2) $\frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}}$
- 3) $\frac{\text{Sum}}{\text{TPD}}$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain :

- 4) $\frac{\text{PAD}}{\text{TKD}}$
- 5) $\frac{\text{PAD}}{\text{KR}}$
- 6) $\frac{\text{PAD} + \text{BHPBP}}{\text{TKD}}$

Dimana ;

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
BHPBP	= Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
TPD	= Total Penerimaan Daerah
TKD	= Total Pengeluaran Daerah
PR	= Pengeluaran Rutin
Sum	= Sumbangan dari Pusat

Menurut Udjianto (2005), untuk mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh kondisi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$TP\ PAD_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana ;

TP PAD_t = Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan

PAD_{t-1} = Pendapatan asli Daerah Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur Derajat Otonomi Fiskal :

$$DOF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dimana :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD_t = Total PAD Tahun t

TPD_t = Total Penerimaan Daerah Tahun t

Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan

daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti, diantaranya lokasi, kondisi keuangan daerah dan potensi daerah. Ringkasan tentang penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian fiskal sebagai variabel terikat (*dependent variable*), sedangkan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah investasi dan PDRB perkapita. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2001 – 2006.

3.1.2 Definisi Operasional

- DKF : Derajat kemandirian fiskal yang diproksi dari rasio antara PAD dengan Total Penerimaan APBD Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun yang sama, dinyatakan dalam persen.
- Investasi : Kinerja investasi yang diproksi dari PDRB menurut penggunaannya yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap ditambah perubahan stok. Pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk pengadaan pembuatan atau pembelian barang-barang modal baru (bukan barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor) termasuk barang bekas modal di Propinsi Sulawesi

Tengah menurut harga berlaku (BPS,2006), dinyatakan dalam jutaan rupiah.

PDRB Perkapita : Total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi atau lapangan usaha dalam perekonomian di Propinsi Sulawesi Tengah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dibagi dengan jumlah penduduk di tahun yang sama menurut harga berlaku, dinyatakan dalam jutaan rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (*time series*) selama periode tahun 2001 s/d 2006. Penggunaan data sekunder dengan periode waktu studi yang relatif pendek yaitu 6 (enam) menjadi permasalahan ketidak akuratan pengumpulan data dan keterbatasan data dari berbagai institusi. Adapun data yang diperoleh berupa :

- a. Data realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau total penerimaan daerah (TPD) Propinsi Sulawesi Tengah, di mana di dalamnya terdapat data :
 1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 2. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.
 3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri dari bagi hasil pajak dan

bukan pajak, sumbangan dan bantuan dan penerimaan lainnya berupa DAU dan DAK.

4. Pinjaman pemerintah daerah.

- b. Data PDRB Propinsi Sulawesi Tengah, dimana didalamnya terdapat data pendapatan dan besaran/nilai sektor ekonomi yang difokuskan pada sembilan sektor/lapangan usaha.
- c. Data Investasi di Propinsi Sulawesi Tengah, dimana didalamnya terdapat data investasi yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto.
- d. Data jumlah penduduk di Propinsi Sulawesi Tengah.

Adapun sumber data berupa buku-buku laporan tahunan beberapa terbitan seperti Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah Dalam Angka, PDRB Sulawesi Tengah dan jurnal-jurnal beberapa terbitan yang dapat diperoleh diberbagai instansi yaitu :

1. BPS Propinsi Sulawesi Tengah
2. Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah
3. Instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data tahunan yang diubah dalam bentuk data kuartalan, sehingga dilakukan interpolasi linier dengan rumus sebagai berikut :

$$Q_{k1} = \frac{1}{4} [(Q_t - 4,5/12 (Q_t - Q_{t-1}))]$$

$$Q_{k2} = \frac{1}{4} [(Q_t - 1,5/12 (Q_t - Q_{t-1}))]$$

$$Q_{k3} = \frac{1}{4} [(Q_t + 1,5/12 (Q_t - Q_{t-1}))]$$

$$Q_{k4} = \frac{1}{4} [(Q_t + 4,5/12 (Q_t - Q_{t-1}))]$$

Dimana :

Q_{k1} = Kuartal pertama

Q_{k2} = Kuartal kedua

Q_{k3} = Kuartal ketiga

Q_{k4} = Kuartal keempat

Q_{kt} = Kuartal pada Tahun t

Q_{kt-1} = Kuartal pada Tahun sebelumnya

Data hasil kuartalan tersebut kemudian akan digeser, hasil perhitungan pada kuartal pertama akan menjadi kuartal keempat pada tahun sebelumnya, dan hasil kuartalan kedua akan menjadi kuartal pertama pada tahun sesudahnya. Sebagai contoh tahun 1992/1993, hasil kuartal pertama menjadi kuartal keempat pada tahun 1992 dan hasil kuartal kedua menjadi kuartal pertama pada tahun 1993.

3.3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka yang merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang berbentuk tahunan diolah dalam bentuk triwulanan untuk menyeragamkan periode masing-masing variabel.

3.4 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dalam penelitian ini adalah metode kuadrat terkecil (*ordinary least squares* = OLS) sedangkan untuk menjawab tujuan kedua digunakan metode analisis deskriptif.

3.4.1 Metode Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Squares*)

Metode OLS diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika dari Jerman. Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut.

Menurut Gujarati (2003) asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan model OLS adalah :

- a. Model regresi linear, artinya linear dalam parameter seperti dalam persamaan di bawah ini :

$$Y_i = b_1 + b_2X_i + u_i$$

- b. Nilai X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
- c. Nilai rata-rata kesalahan adalah nol, atau $E(u_i/X_i) = 0$.
- d. Homokedastisitas, artinya variance kesalahan sama untuk setiap periode (Homo = sama, Skeastisitas = sebaran) dan dinyatakan dalam bentuk matematis $\text{Var}(u_i/X_i) = \sigma^2$.
- e. Tidak ada autokorelasi antar kesalahan (antara u_i dan u_j tidak ada korelasi) atau secara matematis $\text{Cov}(u_i, u_j/X_i, X_j) = 0$.

- f. Antara u_i dan X_i saling bebas, sehingga $Cov(u_i/X_i) = 0$.
- g. Jumlah observasi n harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel bebas).
- h. Adanya variabilitas dalam nilai X , artinya nilai X harus berbeda.
- i. Model regresi telah dispesifikasi secara bebar. Dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik.
- j. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas.

Model ekonomi yang digunakan untuk mengestimasi fungsi kemandirian fiskal adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{DKF = f(INV, PDRB Pekapita)} \quad (1)$$

Model ekonomi dari persamaan (1) tersebut diturunkan menjadi model ekonometrik (Gujarati, 2003) :

$$\mathbf{DKF_t = \alpha_0 + \alpha_1 INV_t + \alpha_2 PDRB Perkapita_t + \mu_t} \quad (2)$$

Dimana :

DKF	: Derajat Kemandirian Fiskal
PDRB Perkapita	: Pendapatan perkapita
α_0	: Konstanta
$\alpha_1 - \alpha_3$: Koefisien variabel
μ	: <i>error term</i>
t	: unit time series

3.4.2. Alat Uji Analisis

3.4.2.1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji ekonometrika atau uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

3.4.2.1.1 Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa variabel bebas dalam penelitian (Mudrajad Kuncoro, 2001). Dalam hal ini dapat disebut variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas nilai korelasi antar sesamanya sama dengan nol (Firmansyah, 2000). Menurut Montgomery Peck (Gujarati, 1995) multikolinearitas mungkin disebabkan oleh faktor-faktor antara lain metode pengumpulan data, spesifikasi model dan model yang *overdetermined*.

Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas menurut Gujarati (2003), dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut :

1. Bila nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Melakukan regresi parsial dengan cara :
 - a. Melakukan estimasi model awal dalam persamaan sehingga didapat nilai R^2
 - b. Melakukan auxiliary regression pada masing-masing variabel penjelas.
 - c. Bandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model persamaan regresi parsial, jika nilai dalam regresi parsial lebih tinggi maka didalamnya terdapat multikolinearitas.

3. Melakukan korelasi antar variabel-variabel independen. Bila nilai korelasi independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas.

3.4.2.1.2 Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting model regresi linear klasik adalah bahwa unsur *disturbance error*, tergantung (*conditional*) pada nilai yang dipilih dari variabel yang menjelaskan, yaitu suatu angka konstan yang sama σ^2 . Hal ini merupakan asumsi homoskedastisitas atau varians yang sama (Gujarati, 2003). Heteroskedastisitas muncul apabila residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi yang lainnya. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Konsekuensi estimasi OLS jika terjadi heteroskedastisitas adalah penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien karena variansnya tidak lagi minimum (Gujarati, 2003).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu varians *error term* suatu model regresi adalah metode White. Metode ini tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual.

Adapun langkah-langkah uji White sebagai berikut :

1. Melakukan estimasi terhadap model yang ada dengan metode OLS dan kemudian mendapatkan residualnya.
2. Lakukan regresi pada persamaan yang disebut regresi auxiliary :

- Regresi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen (no cross terms).
 - Regresi auxiliary dengan perkalian antar variable independent (cross terms).
3. Hipotesis nul dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Iju White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R^2 yang akan mengikuti distribusi chi-squares dengan *degree of freedom* sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistik chi-squares (χ^2) dapat dicari dengan formula sebagai berikut :

$$nR^2 \approx \chi^2_{df}$$

4. Jika nilai chi-squares hitung ($n.R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai chi-squares hitung ($n.R^2$) lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

3.4.2.1.3 Autokorelasi.

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data deretan waktu (*time series*) walaupun dapat terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time*

series, observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Jika terjadi autokorelasi maka sama dengan kasus heteroskedastisitas, yaitu penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Uji *Breusch Godfrey (B-G Test)*.

Pengujian dengan B-G dilakukan dengan meregres variabel pengganggu U_t dengan menggunakan autoregressive model dengan order p :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + v_t \quad (10)$$

Hipotesis nul tidak adanya autokorelasi untuk autoregresif dapat diformulasikan :

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$, jika kita menerima H_0 maka dikatakan tidak ada autokorelasi dalam model.

Adapun prosedur uji dari LM adalah sebagai berikut :

1. Melakukan estimasi dengan metode OLS dan kita dapatkan residualnya.
2. Melakukan regresi residual e_t dengan variabel independen X_t (jika ada lebih dari satu variabel independen maka kita harus masukkan semua variabel independen) dan lag dari residual $e_{t-1}, e_{t-2}, \dots, e_{t-p}$. Langkah kedua ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$e_t = \lambda_0 + \lambda_1 X_t + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + \dots + \rho_p e_{t-p} + v_t$$

Kemudian dapatkan R^2 dari regresi persamaan.

3. Jika sampel adalah besar, maka menurut Breusch dan Godfrey maka model dalam persamaan akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan df sebanyak p . Nilai hitung statistik Chi-Squares dapat dihitung dengan formula :

$$(n - p)R^2 = X^2p$$

Jika $(n-p)R^2$ yang merupakan chi-squares (χ) hitung lebih besar dari nilai kritis chi-squares (χ) pada derajat kepercayaan tertentu (α), kita menolak hipotesis nul (H_0). Hal ini berarti adanya masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka kita menerima hipotesis nul. Artinya model tidak mengandung unsur autokorelasi karena semua nilai p sama dengan nol.

3.4.2.2 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian tersebut meliputi uji t statistik, uji F statistik dan analisis koefisien determinasi (R^2).

3.4.2.2.1 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F statistik dilakukan untuk menguji pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara simultan. F statistik yang signifikan lebih besar dari F tabel pada tingkat resiko kesalahan (α) yang diambil. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis dengan one tail, yaitu sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_0 = 0$, tidak ada pengaruh yang berarti secara simultan pada variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikatnya (Y).

- $H_1 : \beta_0 > 0$, ada pengaruh yang berarti secara simultan pada variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikatnya (Y).

Uji F statistik ini di dalam regresi berganda dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinasi (R^2). Nilai F statistik dengan demikian dapat digunakan untuk mengevaluasi hipotesis bahwa apakah tidak ada variabel independen yang menjelaskan variasi Y di sekitar rata-ratanya dengan derajat kepercayaan (*degree of freedom*) $k-1$ dan $n-1$ tertentu. Dengan kata lain Uji F dapat digunakan untuk menguji hipotesis nul bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yakni $\beta_0 = \beta_1 = \dots = \beta_k = 0$. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$F_{k-1, n-k} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana n = jumlah observasi, k = jumlah parameter. Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.4.2.2.2 Uji Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :

$$H_0 : \beta_0 = 0$$

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung $<$ t tabel maka H_1 ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.4.2.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2003). Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin Besar R^2 , maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan variabel bebas semakin tinggi dan semakin kecil R^2 , maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 sama dengan 1, berarti garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100 persen variasi dalam Y. Sebaliknya, kalau R^2 sama dengan 0 maka model tadi

tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y. Khususnya R^2 terletak antara kedua titik ekstrim ini (0 – 1). Kecocokan model dikatakan lebih baik bila R^2 semakin dekat dengan 1 (Gujarati, 2003).

3.4.3 Analisis Deskriptif

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data – data yang diperlukan dalam analisis ini berupa :

1. PAD yaitu pendapatan yang diterima pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan penerimaan lain-lain, dalam rupiah
2. Bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) yaitu penerimaan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh dari persentase bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan iuran hasil hutan (IHH) dalam rupiah.
3. Sumbangan dan bantuan (S/B) yaitu penerimaan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari pemerintah pusat meliputi subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan melalui berbagai dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam rupiah.
4. Total penerimaan daerah (TPD) yaitu totalitas yang diterima pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah meliputi bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak

(BHPBP), sumbangan dan bantuan dan penerimaan lainnya serta pinjaman pemerintah daerah, dalam rupiah.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (Sukanto Reksohadiprodjo, 1999). Perhitungannya menggunakan rasio PAD terhadap TPD, rasio BHPBP terhadap TPD serta rasio DAU dan DAK terhadap TPD yang nantinya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

Hal ini bermanfaat untuk menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu penelitian.

Adapun untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal digunakan kriteria derajat desentralisasi daerah yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) sebagai berikut :

1. 0,00% s/d 10% : sangat kurang
2. 10,1 s/d 20% : kurang
3. 20,1% s/d 30% : cukup
4. 30,1% s/d 40% : baik
5. 40,1% s/d 50% : sangat baik
6. > 50% : memuaskan

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Estimasi Model OLS

Berdasarkan estimasi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (ordinary least squares = OLS) derajat kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah hasilnya dapat dilihat pada Lampiran B. Namun secara ringkas hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1
Hasil Estimasi Model OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.865320	1.546400	3.792886	0.0011
INV	1.13E-11	5.26E-12	2.150601	0.0433
PDRB	-4.77E-06	3.09E-06	-1.544503	0.1374

R² = 0.397917
F-statistik = 6.939460
Prob = 0.004857

Sebelum dilakukan interpretasi, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik.

5.1.1 Pengujian Terhadap Asumsi Klasik

5.1.1.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan cara regresi parsial yaitu dengan membandingkan nilai R² model regresi utama terhadap R² *auxiliary regression* antar variabel bebas. Yang dimaksud dengan *auxiliary regression* adalah melakukan regresi masing-masing variabel bebas

dengan variabel bebas lainnya. Jika nilai R-square model utama lebih besar dari nilai R-square *auxiliary regression* maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 5.2
Perbandingan R-Square Model Utama dengan *Auxiliary Regression*
Antar Variabel Bebas

Model regresi	Nilai R ² Utama	R ² Auxilliary Regresssion	Keputusan
INV	0.397917	0.965106	Multikolinearitas
PDRB Perkapita		0.965106	Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa variabel investasi dan PDRB perkapita terjadi multikolinearitas.

Dari Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini mengandung masalah multikolinearitas. Menurut Gujarati (2003) dalam kasus multikolinearitas yang bahkan hampir sempurna, hasil estimasi OLS masih tetap *best, linear, unbiased estimator* (BLUE). Menurut Christopher Achen (Gujarati, 2003) multikolinearitas tidak akan merusak asumsi klasik regresi. Dalam model yang mengandung multikolinearitas, koefisien estimasi yang dihasilkan akan tetap memenuhi kaidah BLUE dan menghasilkan koefisien dan standart error yang minimum. Akan tetapi masalah ini juga ditemui pada sampel kecil dan variabel dengan varians yang minimum.

Menurut Blanchard (Gujarati, 2003) multikolinearitas adalah persoalan keterbatasan data (*data deficiency problem*). Dalam suatu penelitian dengan data sekunder yang non eksperimental, seorang peneliti seringkali tidak memiliki pilihan untuk menghindarinya.

Oleh karena dalam model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas sempurna sehingga koefisien variabel independen dan standart error dapat diestimasi, dengan mempertimbangkan multikolinearitas tidak merusak asumsi regresi, maka penelitian ini akan mengikuti ”*do nothing school of thought*”, yaitu tidak melakukan transformasi apapun terhadap model dasar yang mengandung multikolinearitas.

5.1.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model persamaan simultan dinamis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode White. Keputusan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas berdasarkan uji statistik estimator, Jika nilai chi-squares hitung ($n.R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai chi-squares hitung ($n.R^2$) lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

. Dengan menggunakan e-views 4.0 dapat diperoleh hasil regresi White sebagai berikut :

Tabel 5.3
Uji Heteroskedastisitas Model OLS

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.265618	Probability	0.317950
Obs*R-squared	5.049328	Probability	0.282274

Dari hasil regresi di atas menunjukkan bahwa hasil regresi tidak mengandung heteroskedastisitas, dimana nilai probabilitas chi-squares sebesar 0,282274 dengan $\alpha = 10\%$.

5.1.1.3 Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam model dinamis ini digunakan *Breusch Godfrey serial correlation LM Test*.

Hasil regresi uji *Breusch Godfrey serial correlation LM Test* dapat dilihat pada Tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Uji Autokorelasi Model OLS

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.935395	Probability	0.009942
Obs*R-squared	9.228755	Probability	0.009908

Pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi squares sebesar 0.009908, artinya kita menolak hipotesis nul dengan tingkat signifikansi α lebih besar dari 10 % Berdasarkan uji LM ini berarti model persamaan ini mengandung autokorelasi. Untuk penyembuhan masalah autokorelasi dilakukan metode iterasi dari Cochrane-Orcutt.

5.1.2 Pengujian Goodness of Fit Model

Ketepatan suatu fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Uji ini meliputi pengujian secara individual, pengujian secara serentak dan koefisien determinasi.

5.1.2.1 Pengujian Secara Individual (Uji t)

Uji t bertujuan melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Parameter suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan sebaliknya.

Dengan menggunakan $\alpha = 10\%$ dan derajat kebebasan 24 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,318, Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa hasil uji signifikansi secara individual terhadap variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model, dapat diketahui bahwa variabel investasi signifikan pada tingkat kepercayaan 10 persen dimana nilai t hitung (2.150601) lebih besar dari nilai t tabel (1,318). PDRB perkapita tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 10 persen, dimana t hitung (-1.544503) lebih kecil dari t-tabel (1,318).

5.1.2.2 Pengujian Secara Serempak (Uji F)

Selanjutnya dilakukan uji F untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel berarti bahwa secara bersama-sama variabel-variabel yang terdapat dalam model berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan nilai F statistik sebesar 6.939460 dan F tabel sebesar 1,40 dan nilai probabilitasnya kurang dari 0,10 atau mendekati nol (0.004857). Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam model tersebut, variabel-variabel independen secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal.

5.1.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar proporsi variasi variabel bebas yang mampu menjelaskan variabel terikat.

Berdasarkan Tabel 5.1 hasil regresi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.397917. Artinya bahwa 39 persen kemampuan variabel-variabel bebas (independen) yang digunakan dalam model dapat menjelaskan variasi kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan sisanya 61 persen dipengaruhi variabel lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

5.2 Analisis Ekonomi

Simon Kuznets menyatakan bahwa *“a country’s economic growth as a long-term rise in capacity to supply increasingly diverse economic goods to its population, this growing capacity based on advancing technology and the institutional and ideological adjustments that it demands”* (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*) baik jumlah maupun tingkat

kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000). Adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah. , (1) masih rendahnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi dan komunikasi; (2) masih rendahnya tingkat pelayanan sosial dasar; (3) belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya dan pengembangan potensi ekonomi lokal; (4) masih lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumberdaya lokal; (5) masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat; (6) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, kapasitas kelembagaan penataan ruang, dan pemahaman aparat terhadap penataan ruang di wilayah tertinggal dan perbatasan.

5.2.1 Pengaruh Investasi Terhadap Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil estimasi antara investasi dan kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa investasi berpengaruh terhadap kemandirian fiskal. Dimana nilai t statistik investasi sebesar 2,150601 lebih besar dari t tabel (1,318). Hasil estimasi menunjukkan bahwa dengan meningkatnya investasi maka akan semakin meningkatkan kemandirian fiskal.

Hasil studi ini mendukung temuan empiris yang dilakukan oleh Mudrajad dkk (2005), dimana dalam jangka panjang investasi akan meningkatkan potensi output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus baik melalui

penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Menurut Tambunan (2001), investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan dalam negeri meningkat dan seterusnya, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini juga mendukung hasil studi yang dilakukan Wong (2004). Dalam pembangunan daerah diperlukan berbagai fasilitas modal. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan penerimaan daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Menurut Suryaningrum (2000), Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu : (1) pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, (2) pertumbuhan yang disebabkan oleh tenaga kerja, dan (3) pertumbuhan

yang disebabkan oleh perubahan dalam produktivitas (Suryaningrum, 2000). Dengan demikian investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor penentu dalam posisi perekonomian, maka secara tidak langsung investasi berpengaruh terhadap penerimaan daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi, maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi, investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi

Hasil studi ini sejalan teori pertumbuhan Harrod-Domar, yang menjelaskan bahwa investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat menentukan, khususnya watak ganda yang dimiliki investasi yaitu (Jhingan, 1993) : (a) Menciptakan pendapatan yang disebut sebagai dampak permintaan; (b) Memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal yang sering disebut sebagai dampak penawaran investasi. Selama investasi netto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

Persaingan yang semakin tajam menuntut Pemerintah Daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, Selain itu kemampuan daerah untuk menentukan

faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan (KPPOD, 2003).

Memang bukan hal yang mudah untuk menarik investasi masuk ke suatu daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur (listrik, air, jalan, pelabuhan, dan sebagainya), kondisi geografis daerah, pengalaman daerah dalam mengurus investasi serta kemauan yang keras dari pemerintah daerah untuk menarik investor yang ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan mendorong masuknya investasi ke daerah, disamping itu, juga kesiapan dari masyarakat setempat untuk menerima masuknya investasi ke daerahnya. Apabila faktor-faktor tersebut cukup kondusif, niscaya perkembangan investasi akan membaik dan investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Untuk meningkatkan peluang berinvestasi di Propinsi Sulawesi Tengah, maka perlu adanya suatu strategi dari pemerintah daerah berupa reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi :

1. Reformasi pelayanan investasi. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan peran pemerintah daerah dalam hal prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perizinan dan restu BKPM untuk tahap awal diantaranya (JETRO, 2003)
2. Koordinasi antar tingkat pemerintah, baik vertikal maupun horizontal. Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan sistem unit pelayanan terpadu

(UPT) dalam pelayanan perizinan. Sistem ini ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan. Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan sistem perizinan satu atap (SINTAP). Dengan menciptakan pelayanan perizinan dan investasi, permohonan perizinan dapat diproses di satu tempat sehingga birokrasi menjadi lebih pendek, cepat dan efisien.

3. 3 hal utama yang diinginkan investor : (1) penyederhanaan sistem perizinan; (2) penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih; (3) transparansi biaya perizinan.
4. Reformasi peraturan dapat dimulai oleh pemerintah daerah

5.2.2 Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Kemandirian Fiskal

PDRB perkapita tidak berpengaruh terpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah.

Hasil studi ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh BPS (2000) bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kecilnya penerimaan daerah adalah Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita. Rendahnya pendapatan perkapita suatu daerah berarti semakin kecil kemampuan masyarakat tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya.

Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang

positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2000).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang meningkat. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu daerah dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah banyaknya atau sedikitnya lapangan pekerjaan, perbedaan UMR tiap daerah, dan tingkat kemajuan dari daerah itu sendiri.

Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Dalam penelitiannya

Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

5.3 Analisis Deskriptif

Dalam struktur keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai kemampuan riil keuangan daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Faktor kemampuan daerah diukur dari tiga indikator (Sukanto Reksohadiprojo, 1999), yaitu besarnya PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD atau APBD), besarnya bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap TPD serta Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap TPD. Secara rinci, gambaran kemampuan daerah Propinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut :

Tabel 5.5
Rekapitulasi Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 – 2006
(Dalam Persen)

Tahun	Sisa Anggaran Tahun Lalu	PAD/TPD	BHPBP/TPD	DAU & DAK/TPD	Pinjaman Daerah
2001	5,50	22,97	8,01	54,42	-
2002	1,88	18,42	5,04	64,68	0,77
2003	6,75	20,87	4,30	61,91	-
2004	7,28	30,00	5,80	62,41	-
2005	10,5	30,82	8,22	59,26	-
2006	6,47	22,00	6,06	65,47	-
TOTAL	6,76	24,40	6,24	61,36	0,77

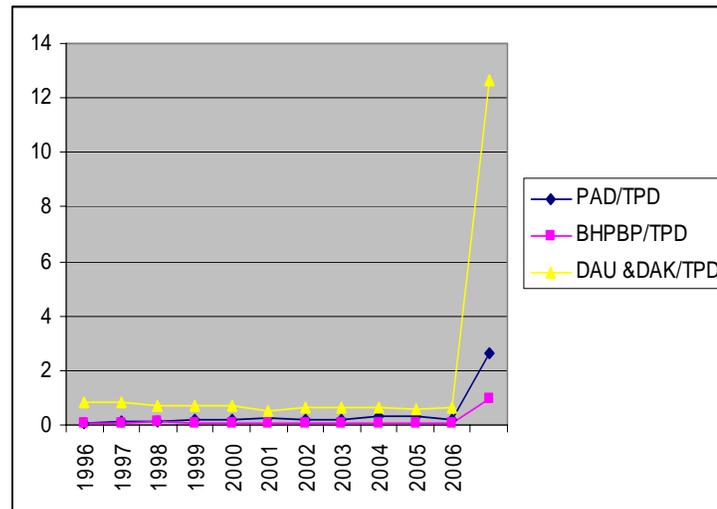
Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Tengah, data diolah

Dari hasil perhitungan dalam Tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa rata-rata dalam kurun waktu enam tahun (2001 – 2006) diperoleh proporsi PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 24,18%.

Kemudian proporsi BHPBP terhadap TPD dalam kurun waktu 2001-2006 secara rata-rata sebesar 6,24%, dimana jika diperhatikan perkembangannya menunjukkan adanya penurunan kontribusi. BHPBP yang cukup besar terjadi. Sedangkan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap TPD dalam kurun waktu 2001-2006 secara rata-rata sebesar 61,36%

Untuk memperjelas gambaran tentang derajat kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah pada Grafik 5.2 sebagai berikut :

Grafik 5.2
Rekapitulasi Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 – 2006
(Dalam Persen)



Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Tengah, data diolah

Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dala APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005). Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan,

transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh teman empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitan Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dilakukan pada saat daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa daerah yang memiliki sumber daya mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat ketergantungan sumber daya yang dimiliki (Bappenas, 2003).

Menurut Elia Radianto (1997) dalam penelitiannya menyimpulkan peran pemerintah pusat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah/derajat otonomi fiskal daerah. Angka ini dapat dilihat dari porsi bantuan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah kepada pusat adalah masih rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), ada lima penyebab tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut :

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan.
2. Tingginya derajat sentralisasi dibidang perpajakan. Pajak yang produktif baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan atau perorangan (termasuk migas) seperti pajak pertambahan nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, kehutanan) semua dikelola administrasi dan ditentukan tarifnya oleh pusat. Alasan sentralisasi perpajakan sering dikemukakan sebagai upaya mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi dan keseragaman perpajakan.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
4. Adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme.

5. Kelemahan dalam pemberian subsidi.

Menurut Susilo dan Adi (2007), tingkat kemandirian daerah setelah otonomi daerah tidak lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

Menurut BPS (2004), ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya PAD terhadap total belanja :

1. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah akan tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah.
2. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita.
3. Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang

transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dih DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

Dengan adanya berbagai macam perubahan Undang-Undang, khususnya mengenai perpajakan, perlu ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan suatu strategi agar dapat memberikan hasil yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis secara maksimal. Secara umum ada beberapa strategi untuk peningkatan pendapatan daerah yaitu :

1. Kemampuan administrator (SDM)

Dari faktor sumber daya manusia dapat dipahami bahwa aparatur daerah merupakan pelaksana dari sebuah kebijaksanaan yang dirumuskan, sehingga sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan program tersebut. Tidaklah mudah untuk menjawab pertanyaan tentang kesiapan sumber daya manusia di daerah. Salah satu hal pasti, tentu saja peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai macam jalur pendidikan dan

pelatihan akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga tidak perlu ada keraguan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

2. Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah masing-masing daerah ditentukan oleh potensi dan pengembangan sumber-sumber ekonomi yang ada. Namun dengan adanya reformasi perpajakan ada sinyal positif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

3. Keadaan infrastruktur

Keadaan infrastruktur fisik dan non fisik juga merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah. Penyediaan infrastruktuur ini akan terkait erat dengan kemampuan keuangan daerah dan negara.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil estimasi OLS menunjukkan investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kemandirian fiskal di era otonomi daerah di Propinsi Sulawesi Tengah. Arah positif ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan menyebabkan meningkatnya kemandirian fiskal.
- 2) Hasil estimasi OLS menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Derajat kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu penelitian (2001 – 2006) disimpulkan :
 - a. Untuk proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) diperoleh hasil rata-rata sebesar 24,18 persen.
 - b. Untuk proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah diperoleh hasil rata-rata sebesar 6,24 persen.
 - c. Untuk proporsi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Total Penerimaan daerah (TPD) diperoleh hasil rata-rata sebesar 61,36 persen .

- d. Untuk proporsi Pinjaman Daerah sebesar 0,77% dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar 6,67%.
7. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah masih rendah, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dari proporsi DAU dan DAK terhadap TPD yang relatif semakin besar. Sebaliknya, kontribusi PAD dan BHPBP terhadap TPD yang masih sangat rendah.

5.2 Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah :

- a). Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui iklim yang kondusif bagi para investor sehingga aktivitas ekonomi daerah meningkat, kesempatan kerja bertambah, pendapatan penduduk naik, daya beli masyarakat meningkat, dan penerimaan pemerintahpun semakin besar.
- b). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

- c). Pemerintah daerah hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif terutama disektor PAD. Penggalan sumber-sumber daerah yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sangat menyadari bahwa temuan-temuan yang dihasilkan belum secara sempurna menjawab semua permasalahan yang dibahas. Terdapat banyak keterbatasan yang melingkupi studi ini, yaitu :

- 1) Periode waktu yang relatif pendek yaitu 6 (enam) tahun, hal ini menjadikan analisis permasalahan kurang sempurna karena pembahasan suatu proses memerlukan periode waktu yang cukup.
- 2) Penelitian ini menggunakan sampel propinsi. Oleh karena itu, bisa jadi daya generalisasi penelitian ini rendah. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran kemandirian daerah di era otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswardi, 2001. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU NO. 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan. **Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Atik Andrianni dan Siti Fatimah Nurhayati, 2004. Analisis Hubungan Proporsi Konsumsi Makanan Dengan Berbagai Stratifikasi Pendapatan Perkapita di Propinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2001. JEP Vol (5) No. 1, Juni 2004.
- Ari Budiharjo, 2003. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Tengah. Tesis S2 MIESP Undip Semarang. Tidak Dipublikasikan
- Bappenas, 2003. Peta Kemampuan Daerah Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Badan Pusat Statistik, 2001 – 2006. **Sulawesi Tengah Dalam Angka**. Propinsi Sulawesi Tengah
- Badan Pusat Statistik, **Statistik Indonesia Dari berbagai Tahun**, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2001 - 2006, **Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha**. Propinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri RI dan Fisipol UGM 1991**. Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab. Jakarta.
- Boediono, 1999, Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Booth, Anne. 2000. Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasi Kebijakan Perpajakan. Masalah Kemampuan Perpajakan, usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan (Rangkuman Collin Mac Andrews dan Icksul Amal), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brahmantio dan Tri Wibowo, 2002, Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Surakarta), **Jurnal Ekonomi dan Keuangan** Vol. 6, No.1.

- Barro, Robert. ,1990. **Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, Journal of Political Economy**, 98 : S103-S125.
- Bahl, Roy., 1999. **Implementation Rules For Fiscal Decentralization Published Of The World Bank**, New York
- Bird, Richard dan Vaillancourt, Francois. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara – Negara Berkembang, Cetakan 1, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (Terjemahan).
- Blakely, Edward J. 1994. **Planning Local Economic Development**. SAGE Publication , second edition.
- Departemen Keuangan RI, 2005. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Daru Kuncoro, 2003. Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Tesis S2 MIESP Undip Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga jakarta. S
- Eni Setyowati dan Siti Fatimah, 2007. ”Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah tahun 1980-2002”. JEP Vol.8 No.1, Juni 2007.
- E. Koswara, 1999. Menyongsong Kebijakan dan Implementasi Otonomi Luas dan Bertanggungjawab Menurut UU NO. 22 tahun 1999. Makalah **Seminar ISEI** Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Repelita VII, Yogyakarta.
- Esther Sri Astuti dan Joko Tri Haryanto. 2006. Kemandirian Daerah : Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis. **Usahawan** No. 03 TH XXXV. Maret 2006.
- Elmi, Bachrul, 2002. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Otonomi Daerah, **Jurnal Ekonomi dan Keuangan** Volume 6, Nomor 4.
- Elia Radianto, 1997. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu Studi di Maluku, **Prisma** Vol.3.
- Firmansyah, 2000. Aplikasi Econometric E-Views 3.0, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

- Gujarati, Damodar. 2003. **Essentials of Econometric**, McGraw Hill International Editions.
- Halim, Abdul, 2001. “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul, 2004. “Manajemen Keuangan Daerah”. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN.
- Ibnu Syamsi, 1994. *Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Iskandar, N . 1974. ” Beberapa Aspek Permasalahan Kependudukan di Indonesia ”. Special Reprint Series No.4. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- JENTRO, 2003. *Japaness-Affiliated manufacturers in Asia*. Survey . March
- Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Keneeth Davey, 1986. Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga (Terjemahan, Amanullah Dkk) Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Khusaini, Mohammad ,2006. Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE Unibraw, Malang.
- KPPOD. (2002,2003). Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Jakarta: KPPOD
- Kristiadi, JB, 1985. Naskah Sekitar Peningkatan Pendapatn Daerah, Majalah Prisma, No.12 Tahun XIV.
- LPEM FEUI, 2000, Kajian Analisis Penerimaan Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal, Laporan Pendahuluan, Jakarta. (Tidak dipublikasikan).
- Lincolyn Arsyad. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (1st ed). Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo, 1999. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Mahi, Raksaka et al. **Fiscal Decentralizations : Its Impact on Cities Growth**. Jakarta : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 2, No. 1, Juli 2001

- Mahi, Raksaka, 2005. *Manajemen Keuangan di Era Otonomi*. Usahawan No. 12 TH XXXIV Desember 2005
- Mudrajad Kuncoro, 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMD YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro dan Anggi Rahajeng, 2005. *Peta dan Prospek Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia*.Kompak No.13 Januari-April.
- Munawar Ismail, 2001, *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*, **Jurnal Fakultas Ekonomi** Universitas Brawijaya, Malang.
- Meier, Gerald M. (1995). ” *Leading Issues in Economic Development*” Edisi Ke-6. Oxford University Press, Oxford, Bab VI.
- Nawang Astaning Widiastuti, 2000. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 1987 -1988, **Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya**.
- Ray, D. 2002. “ *Notes on Domestic Trade and Decentralization*. Unpublished Paper. Desember
- Republik Indonesia , (2004-a), **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**.
- Republik Indonesia , (2004-b), **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- Rubenstein, Ross, 2002. **Budgeting and Fiscal Management**. International Training Program, GSU, Atlanta.
- Reksoprayitno, Soediyono, 1990. *Ekonomi Makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Liberty . Yogyakarta.
- Sritua, Arif, 1998, *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta
- Sriyana, Jaka, 1999. Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan *Daerah*. **Jurnal Ekonomi dan Pembangunan**, Volume 4 No. 1

- Sidik, Machfud , 2001. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah. Batam : Sidang Pleno X ISEI
- Sidik, Machfud , 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Makalah **Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia**, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Sadono Sukirno, 2000. Makroekonomi Modern – Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Andi, Yogyakarta.
- Sodik, Jamzani dan Didi Nuryadi, 2005. Investasi dan Pertumbuhan Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi. **Jurnal Ekonomi Pembangunan** Vol. 10, Agustus.
- Sutrisno, 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Tesis S2 MIESP Undip Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Suryaningrum, 2000. Pertumbuhan ekonomi Regional di Indonesia. **Media Ekonomi dan Bisnis**, FE-Undip , Vol. XII No.1 Juni 2000.
- Susilo, Gideon Tribudi dan Priyo Hadi Adi, 2007. Analisis Kinerja Keuangan APBD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Simanjuntak, Thamrin, 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah , **Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah**. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Tambunan, TH. Tulus, 2001. Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Udjianto, Didi. Welly, 2005. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Periode 1998 – 2002). **Ekobis**, Vol. 6, No. 1, Januari 2005.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000** tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- World Bank . 2003, Kota – Kota dalam Transisi : Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi di Indonesia. **Working Paper No. 7**.

Wahyu Widayat, 2000. Maksimisasi PAD Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah ,
Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN.

Yusriadi (1996). Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB
(Studi Kasus di Banda Aceh, Tesis S2 MEP UGM Yogyakarta. Tidak
dipublikasikan.